

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Abdul Rahman BP¹; Yusdayanti²; Muhammad Nawir³; Hidayah Quraisy⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Abdul Rahman BP

E-mail: abdrahmanbp123@gmail.com

Abstract

Every human being has the right to and hopes to always develop in education, to support the fulfillment of their needs which are increasingly complex. Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed by themselves, society, nation and state. Without education, a person will find it difficult to adapt and get a decent job. Therefore, the future of the nation depends on the applicable educational formulation. In the formulation of educational policy formulations, of course, it is not determined just like that but takes into account many factors and several conditions that must be adapted to the climate of a nation's society. The formulation of education policies that have been set by the state will be even better when the implementing stakeholders are qualified in implementing them. So it is necessary to adjust the competence of the stakeholders who are the spearhead of implementing the formulation of educational policies.

Keywords: Education Policy; Competence; Education.

Abstrak

Setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan mereka yang semakin hari semakin kompleks. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa pendidikan, seseorang akan sulit untuk beradaptasi serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena itu, masa depan bangsa bergantung pada formulasi pendidikan yang berlaku. Dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan tentunya tidak ditetapkan begitu saja melainkan mempertimbangkan banyak faktor dan beberapa kondisi yang harus disesuaikan dengan iklim masyarakat suatu bangsa. Formulasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara akan semakin bagus ketika stakeholder pelaksana mumpuni dalam mengimplementasikannya. Sehingga

perlu ada penyesuaian kompetensi para stakeholder yang menjadi ujung tombak pelaksanaan formulasi kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Kompetensi; Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Hal ini menjadikan pendidikan telah menjadi kebutuhan primer manusia.

Dewasa ini, pendidikan dirancang sedemikian rupa hingga menjadi sesuatu yang dapat menunjang manusia dalam pemenuhan kebutuhannya yang semakin hari semakin kompleks. Tanpa pendidikan yang mumpuni seseorang akan sulit untuk beradaptasi serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentunya pendidikan akan mendapatkan banyak perhatian baik dari pemerintah dan masyarakat, karena pendidikan adalah sesuatu yang "vital".

Berbicara mengenai pendidikan, masyarakat tidak akan pernah kehabisan bahan disebabkan banyak hal dalam pendidikan terutama Indonesia yang mesti diperbaharui terutama yang berkaitan dengan formulasi kebijakan yang berlaku. Karena masa depan bangsa negeri ini bergantung akan formulasi pendidikan yang berlaku.

Permasalahan tersebut selanjutnya dikaji dalam tulisan ini dengan memfokuskan kepada pendalaman makna formulasi kebijakan pendidikan, menentukan formulasi kebijakan pendidikan, mendalami teori yang digunakan dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan formulasi kebijakan pendidikan.

PEMBAHASAN

A. Definisi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serya mencari peluang-peluang untu mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I dijelaskan, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi definisi formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan.

B. Faktor Yang Memengaruhi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan tentunya tidak ditetapkan begitu saja melainkan mempertimbangkan banyak faktor dan beberapa kondisi yang harus disesuaikan dengan iklim masyarakat suatu bangsa. Dengan harapan formulasi telah disusun sedemikian rupa dan kompleks tersebut dapat benar-benar berkontribusi dalam mencetak generasi bangsa yang unggul dan mampu bersaing secara global. Adapaun faktor-faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama “rationale comprehensive” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan

atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh, bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar proses formulasi kebijakan.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan.

C. Teori Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Ada banyak teori atau pendekatan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan, namun dalam makalah ini hanya akan dibahas beberapa teori saja. Berikut teori dalam formulasi kebijakan pendidikan.

1. Teori inkrementalis, teori ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai, teori ini memiliki sifat pragmatis.
2. Teori demokratis, teori ini implementasinya pada good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituten, dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasi keberadaan. Apabila teori ini mampu dijalankan maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.
3. Teori Strategis, Inti dari teori ini adalah perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan.

4. Teori pilihan publik, teori ini sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.
5. Teori sistem, formulasi kebijakan dengan model sistem mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan hasil (output) dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari input, throughput dan output. Sehingga dapat dipahami, proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik mengandalkan masukan (input) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan.

D. Pihak yang terlibat dalam Perumusan Formulasi Kebijakan Pendidikan

Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (*policy maker*). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam:

1. Legislatif

Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan/mengesahkan kebijakan, para legislator tersebut berada pada tataran MPR, DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II.

2. Eksekutif

Eksekutif disini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jbaran. Eksekutif

memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif disini antara lain Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah Mendiknas, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, dan Rektor.

3. Administrator

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan Negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera.

4. Partai Politik (Parpol)

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Di Indonesia peran Parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan Parpol. Peran parpol disini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan Negara maupun daerah.

5. Interest Group (kelompok berkepentingan)

Interest Group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik.

6. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMII, dan KAHMI.

7. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga dimana para elite akademisi berada, perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena

disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi.

8. Tokoh perorangan.

Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan, dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya.

PENUTUP

Dalam penyusunan formulasi kebijakan pendidikan tentunya akan dilakukan setelah mempertimbangkan banyak faktor, kondisi, serta dana yang sesuai kondisi suatu negara. Formulasi yang dihasilkan pun akan melalui proses panjang, diskusi penilaian, tahap uji coba dan penilaian kembali yang akan dilakukan oleh masing-masing ahli dibidangnya agar tercipta suatu fomulasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan mampu berkontribusi dalam mencetak generasi emas yang akan membawa Indonesia ke jajaran negara elit dunia.

Formulasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara akan semakin bagus ketika stakeholder pelaksana mempuni dalam mengimplementasikannya. Sehingga perlu ada penyesuaian kompetensi para stakeholder yang menjadi ujung tombat pelaksanaan formulasi kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imran. 1993. Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arwildayanto; Sukung, Arifin; dan Sumar, Warni Tune. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: CV Cendekia Press.
- Darwis. Formulasi Kebijakan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan Tahun 2013. Jom FISIP VOL. 2 NO.2 Oktober 2015, h. 1-13
- M Irfan Islamy. 2001. PrinsipPrinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara: Jakarta
- Rusdiana. (2014). Kebijakan Pendidikan. Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Uin Sunan Gunung Djati

- Suhelayanti. Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 1, 2019, h. 11 – 26
- Supandi & Sanusi. 1988. *Kebijakan & Keputusan Pendidikan*. Depdikbud: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan
- Solihin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan, dari formulasi keimplementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.